

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah rangkaian perubahan atau proses yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menempuh perkembangan suatu perekonomian. Penilaian suatu keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dan ketidakseimbangan antara penduduk, daerah dan lingkungan. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, dan Smith 2010). Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan ekonomi adalah untuk menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga saat ini masih menjadi isu utama di belahan bumi manapun. Selain sifatnya yang multidimensi, kemiskinan ialah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang melainkan juga di negara maju. Menurut (Widodo, 2006) Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi, sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan/ketimpangan di dalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi.

Indonesia sendiri, masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama yang sangat kompleks. Pemerintah pusat maupun daerah, telah melakukan upaya dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah pula membuat beberapa program untuk menuntaskan kemiskinan yaitu dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BSM (Beasiswa/Bantuan Siswa Miskin), Raskin (Beras Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam mendukung Usaha Mikro

Kecil Menengah untuk menghasikan suatu barang ataupun jasa. Namun program-program tersebut dirasakan masih belum cukup maksimal. Salah satu aspek dalam peranan penting penanggulangan kemiskinan tepat sasaran adalah dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat serta terpercaya untuk dipakai sebagai penentuan nilai suatu ukuran kemiskinan maupun bantuan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan bagi masyarakat untuk tercapainya suatu kesejahteraan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantara yang ada yaitu tingkat upah yang masih ada dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Seseorang dapat dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya ataupun belum berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan. Menurut (M. Kuncoro dalam Ravi Dwi, 2010) semua ukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen yaitu, 1). Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, 2). Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Ravi Dwijayanto 2010). Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu makanan golongan kaum miskin. Adapun elemen kedua sifatnya lebih subjektif.

Dalam hal ini pula Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak periode tahun 2015-2019 menunjukkan persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang cukup signifikan perbandingan Provinsi Kalimantan lainnya yaitu Kalimantan Utara dengan persentase kemiskinan 6,63 persen, Kalimantan Timur 5,94 persen, Kalimantan Tengah 4,98 dan Kalimantan Selatan 4,55 persen. Persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2015 mencapai angka sebesar 8,03 persen dan pada tahun 2016 angka tersebut menurun menjadi 7,87 persen. Periode tahun 2017, 2018 dan 2019 persentase kemiskinan di Kalimantan Barat naik dan terus menurun perlahan dengan angka 7,88, 7,77 hingga 7,49 persen, yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2015 - 2019 (%)

No	Kabupaten / Kota	Persentase Kemiskinan					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Sambas	9,42	8,54	8,59	8,55	8,19	8,66
2	Kabupaten Bengkayang	6,94	7,46	7,51	7,17	6,69	7,15
3	Kabupaten Landak	13,51	12,32	12,23	11,77	11,47	12,26
4	Kota Mempawah	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32	5,63
5	Kabupaten Sanggau	4,57	4,51	4,52	4,67	4,57	4,67
6	Kabupaten Ketapang	11,72	10,99	11,02	10,93	10,54	11,04
7	Kabupaten Sintang	9,33	10,07	10,20	10,35	9,65	9,92
8	Kabupaten Kapuas Hulu	9,66	9,82	9,45	9,60	9,62	9,63
9	Kabupaten Sekadau	6,50	6,14	6,46	6,17	6,11	6,28
10	Kabupaten Melawi	12,57	12,63	12,54	12,83	12,38	12,59
11	Kabupaten Kayong Utara	9,84	10,19	9,89	10,08	9,98	10,00
12	Kabupaten Kubu Raya	5,22	5,04	5,26	5,07	4,74	5,07
13	Kota Pontianak	5,,22	5,55	5,31	5,00	4,88	5,18
14	Kota Singkawang	5,,76	5,33	5,42	5,12	5,91	5,44
15	Prov. Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49	7,81

Sumber: BPS Kota Pontianak diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 menjelaskan bahwa persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat 14 Kabupaten / Kota pada periode 2015 hingga 2019 mengalami gejala naik-turunnya angka persentase. Secara umum ada beberapa di 14 Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan persentase kemiskinan tertinggi di antara yang lainnya. Dalam hal ini pada tahun 2015 Kabupaten Landak persentase kemiskinan mencapai 13,51 persen. Hal ini menjadikan pula Kabupaten Landak sebagai daerah dengan angka persentase kemiskinan terbesar di 14 Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pada periode tahun 2016-2017 persentase kemiskinan di kabupaten Landak dapat ditekan dengan angka sebesar 12,32 sampai 12,23 persen dan selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2019 persentase kemiskinan di Kabupaten Landak terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 11,77 dan 11,47 persen. Namun pada tahun 2016 hingga 2019, Kabupaten Melawi yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berbanding terbalik dengan Kabupaten Landak yang dapat menekan angka kemiskinan. Kabupaten Melawi tercatat sebagai Kabupaten dengan persentase

kemiskinan yang cenderung meningkat dan mengalami gejala naik-turunnya angka persentase. Pada tahun 2015 Kabupaten Melawi tercatat dengan angka sebesar 12,57 persen. Periode 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase dari 12,63, ke 12,54 persen. Pada tahun 2018 Kabupaten melawi mengalami kenaikan angka persentase kemiskinan sebesar 12,83 persen dan tahun 2019 Kabupaten Melawi persentase kemiskinan menurun dengan angka sebesar 12,38 persen dan ikuti oleh Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Persentase kemiskinan terendah berada di Kabupaten Sanggau dan Kubu Raya dan pastinya angka persentase kemiskinan yang cenderung tidak merata pada 14 Kabupaten / Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Penilaian ekonomi suatu Negara harus di lakukan, karena dengan mengukur prestasi ekonomi dapat diukur pula keberhasilan pemerintahan yang dijalankan, serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan makro ekonomi yang dijalankan. Untuk mengukur prestasi makro ekonomi dapat dilihat dari indikator ekonomi, salah satunya pengangguran. Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, kata lainnya ialah pengangguran yang tercipta sebagai akibat bertambahnya lapangan pekerjaan yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Peranan pemerintah sangat penting dalam menanggulangi tingkat pengangguran ialah dengan cara Menyelenggarakan Bursa Tenaga Kerja, Memberikan Pelatihan Kerja, Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan untuk menuntaskan pengangguran.

Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan persentase angka kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori bila masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan ada kemiskinan. Dapat

dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan bekerja tinggi) maka persentase kemiskinan juga rendah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 hingga 2018 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Angka TPT di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dan 2016 sama yaitu sebesar 5,15 persen dan pada tahun 2017 hingga 2018 angka TPT terus menurun dari 4,36 ke 4,26 persen. Periode tahun 2019 TPT Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan angka yaitu sebesar 4,45 persen, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019 (%)

No	Kabupaten / Kota	Persentase TPT					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Sambas	4,85	4,85	4,24	3,34	3,58	4,17
2	Kabupaten Bengkayang	3,15	3,15	2,40	2,40	2,71	2,16
3	Kabupaten Landak	5,81	5,81	2,03	2,29	2,75	3,79
4	Kota Mempawah	7,12	7,12	6,72	6,87	5,19	6,60
5	Kabupaten Sanggau	5,13	5,13	3,27	2,47	3,07	3,81
6	Kabupaten Ketapang	4,29	4,29	3,97	3,23	4,53	4,06
7	Kabupaten Sintang	2,48	2,48	1,93	2,34	3,20	2,49
8	Kabupaten Kapuas Hulu	3,00	3,00	2,21	1,58	2,46	2,45
9	Kabupaten Sekadau	2,97	2,97	0,64	2,80	3,14	2,50
10	Kabupaten Melawi	3,03	3,03	2,11	3,15	2,45	2,75
11	Kabupaten Kayong Utara	3,76	3,76	5,00	3,93	4,00	4,09
12	Kabupaten Kubu Raya	6,11	6,11	5,91	5,04	5,62	5,76
13	Kota Pontianak	9,44	9,44	9,36	10,37	9,13	9,55
14	Kota Singkawang	6,12	6,12	8,08	7,88	6,44	6,93
15	Prov. Kalimantan Barat	5,15	5,15	4,36	4,26	4,45	4,67

Sumber: BPS Kota Pontianak diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 menjelaskan bahwa 14 Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat tingkat pengangguran pada wilayah tersebut relatif rendah. Kenyataan yang terjadi, dimana kondisi Provinsi Kalimantan Barat dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah namun tidak dapat menekan angka persentase kemiskinan. Berdasarkan BPS merilis, pada periode 2019 terdapat 2.369.015 penduduk yang bekerja di Kalimantan Barat. Sedangkan yang tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 110.272 orang. Menurut Kabupaten /

Kota di Provinsi Kalimantan Barat TPT tertinggi pada periode 2015 hingga 2019 terjadi di Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kota Mempawah. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain tingkat pengangguran, kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap persentase kemiskinan. Upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja akan meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri / PERMENAKER NO. 21 TAHUN 2016, LL NAKER 2016 : 8 HLM; BN NAKER TH, 2016 NO. 948 tentang Kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi, dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. Komponen serta jenis kebutuhan hidup dapat ditinjau dalam jangka waktu lima tahun, yang dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan Dewan Pengupahan Nasional, hasil kajian berupa rekomendasi. Hasil perhitungan nilai KHL ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi / Kabupaten / Kota, yang akan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penetapan upah minimum, dapat digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum tahun pertama dalam periode 5 (lima) tahun. KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat kehidupan yang layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Oleh karena itu, KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum. Ada 7 komponen KHL yang selalu dihitung, yaitu

makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi serta tabungan. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat merilis upah minimum Kabupaten / Kota pada periode tahun 2015 hingga 2019 untuk dapat membantu menanggulangi kemiskinan yang ada dan sebagai salah satu faktor penentu untuk mengukur kemiskinan. Provinsi Kalimantan Barat sendiri mendapatkan upah minimum sebesar Rp 1.560.000,-. Pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan yang signifikan, upah minimum rata-rata di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp 1.739.400,- dan Rp 1.882.900,-. Pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan upah minimum pada level Rp 2.046.900,- sampai dengan Rp 2.211.500,- yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

**Upah Minimum Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2015 - 2019 (Rp)**

No	Kabupaten / Kota	Um 2015	Um 2016	Um 2017	Um 2018	Um 2019
1	Kota Pontianak	1,600.000	1.815.000	1.972.000	2.145.000	2.318.000
2	Kota Mempawah	1.575.000	1.756.125	1.901.005	2.066.600	2.232.600
3	Kabupaten Landak	1.606.800	1.801.583	2.000.920	2.175.200	2.349.870
4	Kabupaten Sintang	1.600.000	1.800.000	2.025.000	2.215.000	2.393.000
5	Kabupaten Sambas	1.650.000	1.839.750	2.022.800	2.200.000	2.377.000
6	Kabupaten Ketapang	1.800.000	2.007.000	2.172.500	2.439.300	2.636.000
7	Kabupaten Kapuas Hulu	1.600.000	1.784.000	2.028.000	2.204.650	2.381.700
8	Kota Singkawang	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.164.991	2.338.840
9	Kabupaten Sanggau	1.765.000	1.823.025	1.973.425	2.145.310	2.318.000
10	Kabupaten Kubu Raya	1.625.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.242.000
11	Kabupaten Sekadau	1.700.000	1.784.000	1.931.180	2.099.386	2.267.970
12	Kabupaten Bengkayang	1.660.000	1.860.000	2.013.450	2.189.000	2.364.777
13	Kabupaten Melawi	1.600.000	1.800.000	1.948.500	2.118.214	2.288.306
14	Kabupaten Kayong Utara	1.765.000	1.967.975	2.130.300	2.315.850	2.501.850
15	Provinsi Kalimantan Barat	1.560.000	1.739.400	1.882.900	2.046.900	2.211.500

Sumber: Disnakertrans Kota Pontianak 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa secara umum upah minimum di 14 Kabupaten / Kota terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2015 khusus Kabupaten Ketapang mendapatkan upah minimum tertinggi diantara Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai sebesar Rp 1.800.000,- di tahun 2016 hingga 2019 Kabupaten Ketapang terus mengalami kenaikan upah dari Rp 2.007.000,- ke 2.172.500,- 2018 naik ke Rp 2.439.300,- dan pada tahun 2019 menyentuh nilai sebesar Rp 2.636.000,- dan diikuti oleh Kabupaten Kayong Utara. Untuk upah minimum terendah berada di Kota Mempawah dan Kota Pontianak.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat. Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi penuntasan kemiskinan yang ada dalam pembangunan ekonomi. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat penting ataupun keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan yang ada di suatu wilayah. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini pula Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak merilis pada periode 2015-2019 pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat tergolong relatif lambat dan mengalami gejala naik turunnya angka persentase. Pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Barat tercatat angka sebesar 4,81 persen dan di tahun 2016 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami penurunan yang lambat dari angka 5,20 turun ke 5,17 persen dan terus menurun ke angka 5,06 sampai dengan angka sebesar 5,00 persen pertumbuhan ekonomi kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015 - 2019 (%)

No	Kabupaten / Kota	Persentase Pertumbuhan Ekonomi					Rata-rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Kabupaten Sambas	4,78	5,24	5,13	5,10	4,89	4,08
2	Kabupaten Bengkayang	3,96	5,15	5,66	5,37	5,23	5,07
3	Kabupaten Landak	5,11	5,28	5,21	5,12	5,01	5,15
4	Kota Mempawah	5,6	5,99	5,93	5,87	5,81	5,84
5	Kabupaten Sanggau	3,15	5,34	4,5	4,47	4,3	4,35
6	Kabupaten Ketapang	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72	7,08
7	Kabupaten Sintang	4,65	5,28	5,33	5,47	5,09	5,16
8	Kabupaten Kapuas Hulu	4,67	5,28	5,39	5,23	4,03	4,92
9	Kabupaten Sekadau	5,75	5,93	5,85	5,88	4,49	5,58
10	Kabupaten Melawi	4,61	4,75	4,79	5,44	4,97	4,91
11	Kabupaten Kayong Utara	5,03	5,98	5,42	5,02	5,04	5,30
12	Kabupaten Kubu Raya	6,21	6,37	6,56	5,49	5,82	6,09
13	Kota Pontianak	4,84	5,08	5,05	5,03	4,81	4,96
14	Kota Singkawang	6,18	5,17	5,42	4,71	4,53	5,20
15	Prov. Kalimantan Barat	4,81	5,20	5,17	5,06	5,00	5,05

Sumber : BPS Kota Pontianak diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1.4 Menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat relatif kecil dan mengalami gejala naik-turunnya angka persentase. Dalam hal ini di Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dan cenderung naik turun. Tahun 2015 Kabupaten Sambas mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen dan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sambas meningkat dan mencapai angka 5,24 persen. Periode 2017 hingga 2019 Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi dari 5,13 ke 5,10 sampai ke angka 4,89 persen pertumbuhan ekonomi dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau. Sedangkan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan cukup signifikan pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini pula dapat disimpulkan bahwa untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan barat tahun 2015 hingga 2019 mengalami fluktuatif angka yang cenderung tidak stabil di setiap wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Selama periode tahun 2015 hingga 2019 angka persentase kemiskinan Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat cukup signifikan perbandingan Provinsi Kalimantan lainnya. Kemiskinan merupakan masalah sangat sulit untuk dapat di tanggulasi. Oleh sebab itu untuk menanggulangi kemiskinan tentu harus di tanggulasi dari dasar, seperti pemerintah harus memperluas kesempatan dalam hal bekerja sehingga masyarakat yang mencari kerja tidak lagi kesulitan dan jika masyarakat tersebut bekerja otomatis akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Program-program pendukung pemerintah yang sangat efektif untuk menanggulangi masyarakat yang menganggur yaitu Memberikan Pelatihan Kerja, Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan terhadap masyarakat dalam membantu menuntaskan tingkat pengangguran supaya masyarakat dapat keluar dari permasalahan kemiskinan.

Dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah minimum karena bila upah minimum meningkat maka kesejahteraan para pekerja akan meningkat dan akan terbebas dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus ditopang pemerintah pusat maupun daerah dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai sumber daya ekonomi dalam proses produksi untuk menghasilkan pendapatan. Oleh sebab itu perolehan pendapatan ini selanjutnya akan menimbulkan daya beli masyarakat sekaligus menimbulkan pasar yang cukup besar dan pada akhirnya masyarakat akan memperoleh kesejahteraan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Atas dasar permasalahan diatas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari fenomena persentase kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat ditemukan gagasan-gagasan baru dari hasil penyelesaian permasalahan penelitian ini guna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ekonomi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian diharapkan dengan adanya penelitian ini agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi khususnya dibidang kemiskinan. Diharapkan penelitian ini agar dapat di jadikan referensi serta acuan untuk membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencari solusi agar kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat menurun secara bertahap dan signifikan.

1.5 Gambaran Kontekstual

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*Secondary Data*) dimana data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Penelitian terdahulu yang ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta jurnal-jurnal ekonomi dan situs website. Adapun daerah yang diamati pada penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.